

**KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA DITINJAU DARI PASAL 18A
AYAT (2) UNDANG - UNDANG DASAR 1945**

SKRIPSI



OLEH :

ALFONSUS RYAN WIDIONO

NIM : 1312000277

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA DITINJAU DARI PASAL 18A
AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

SKRIPSI



Oleh :

ALFONSUS RYAN WIDIONO

NIM : 1312000277

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2023

**KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA DITINJAU DARI PASAL 18A AYAT (2) UNDANG-UNDANG
DASAR 1945.**

SKRIPSI

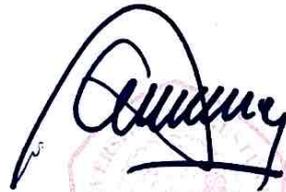
**Diajukan untuk melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

ALFONSUS RYAN WIDIONO

NBI : 1312000277

Dosen Pembimbing:



Prof. Dr. Slamet Suhartono,SH.,M.H.,CMC.

NPP/NIP : 20310860065

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

**KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA DITINJAU DARI PASAL 18A AYAT (2) UNDANG-UNDANG
DASAR 1945**

Oleh:

ALFONSUS RYAN WIDIONO

NBI : 1312000277

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

Pada Tanggal 11 Desember 2023

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No.SK : 1484/ST/FH/XII/2023

Tanggal : 11 Desember 2023

TIM PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. Slamet Suhartono, SH., M.H., CMC.

NPP : 20310860065

Sekretaris : Dipo Wahyoeono H., S.H., M.H.

NPP : 20310880149

Anggota : Merline Eva Lyanthi, S.H., M.Kn.

NPP : 20310230880

Mengetahui :

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Dekan



Prof. Dr. Slamet Suhartono, SH., M.H., CMC.

NPP : 20310860065

**HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alfonsus Ryan Widiono
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NBI : 1312000277

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Jurnal Hukum Mimbar Keadilan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya: **KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DITINJAU DARI PASAL 18A AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR 1945**. Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 12 Desember 2023
Yang bertanda tangan dibawah ini,



ALFONSUS RYAN WIDIONO

NBI : 1312000277

**HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alfonsus Ryan Widiono
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
NBI : 1312000277

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Journal of Social Science Research:

“KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DITINJAU DARI PASAL 18A AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR 1945”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 12 Desember 2023
Yang bertanda tangan dibawah ini,



ALFONSUS RYAN WIDIONO

NBI : 1312000277

SUAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfonsus Ryan Widiono

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, yang berjudul:

KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DITINJAU DARI PASAL 18A AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR 1945. Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengatahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 12 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



ALFONSUS RYAN WIDIONO

NBI : 1312000277

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfonsus Ryan Widiono

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA DITINJAU DARI PASAL 18A AYAT (2) UNDANG-UNDANG
DASAR 1945”**

Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin kepada saya maupun memberikan *royalty* kepada saya selama mencantumkan nama saya sebagai penulis,
Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Desember 2023
Yang membuat pernyataan,



ALFONSUS RYAN WIDIONO
NBI: 1312000277



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alfonsus Ryan Widiono

NBI : 1312000277

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, atas karya saya yang berjudul :

**Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Ditinjau
Dari Pasal 18A Ayat (2) UUD 1945**

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada : 11 Januari 2024

Tanggal



(Alfonsus Ryan Widiono)

HALAMAN PERSEMBAHAN

“ PUJI TUHAN YESUS KRISTUS ”

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Tuhan Yang Maha Esa yang dengan rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa mengiringi penulis, sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Ditinjau Dari Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945” ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Oleh karena itu, dalam skripsi menguraikan permasalahan hukum yang disertai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian serta pertanggungjawaban sistematika. Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan dan kelemahan yang mungkin ada di dalam skripsi ini. Untuk itu, penulis senantiasa mengharapkan bantuan dari pembaca berupa kritik dan saran yang bersifat membangun agar skripsi ini lebih sempurna. Dalam kesempatan ini, tidak lupa penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada :

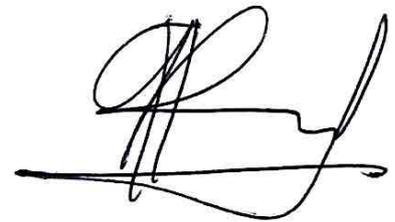
1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Keluarga dan saudara - saudara, khususnya kepada ibu saya Maria Sri Widiyastuti dan ayah saya Timbul Senoaji yang selalu mendoakan setiap apa yang sedang diusahakan oleh penulis, memberikan bantuan secara moriil maupun secara materiil kepada penulis dan juga selalu mendampingi penulis baik senang maupun duka.
3. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho. M.M., CMA.,CPA., Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H., CMC., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya,
5. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
6. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H.,M.H., CMC., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang penulis hormati dan sayangi, dengan hati yang tulus dan sabar selalu membimbing dan mengarahkan serta memberikan nasihat dan saran – sarannya kepada penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya beserta seluruh staff yang ada.
8. Teman mengagumkan yang penulis sayangi, yang selalu menemani penulis disegala kondisi, memberikan perhatian khusus untuk penulis dan selalu

mengapresiasi apapun pencapaian yang dilakukan oleh penulis, sehingga menjadi sumber kebahagiaan dan semangat yang baru.

9. Seluruh teman – teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
10. Alfonsus Ryan Widiono, selaku diri penulis yang senantiasa telah mengusahakan berdiri tegar melewati segala rintangan dengan senyum keceriaan dan berhasil menjadi warna bagi setiap kehidupan disekitar. Diakhir kalimat penulis berdoa, semoga hal – hal baik selalu berpihak kepada siapapun aamiin.

Surabaya, 12 Desember 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, representing the name Alfonsus Ryan Widiono.

Alfonsus Ryan Widiono

1312000277

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji wewenang pemerintah daerah pada pengelolaan pertambangan mineral dan batubara setelah penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, utamanya pada pasal 6 ayat (1) yang menjadi fokus utama penelitian ini, sebab pada peraturan sebelumnya, pemerintah daerah mempunyai kewenangan pada pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, namun dalam undang-undang terkini kewenangan pemerintah daerah dihapus dan diubah menjadi hanya pemerintah pusat saja yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dipergunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan mencari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum dengan teknis analisis secara normatif sehingga dalam penelitian ini menghasilkan kesimpulan yang preskriptif. Hasil penelitian yang didapat setelah menganalisa kesesuaian Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap konsep otonomi, konsep negara kesatuan dan keadilan pembagian urusan yang sesuai dengan Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, serta membandingkan undang-undang yang lama dengan yang terkini, adalah tidak sesuai, terjadi konflik norma dan tidak sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang diamanatkan konstitusi sebab telah ditemukan adanya sentralisasi kewenangan dan pembagian urusan yang tidak adil terhadap pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Kewenangan, Pertambangan Mineral dan Batubara.

ABSTRACT

This research aims to examine the authority of local governments in mineral and coal mining management after the enactment of Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining Management, especially in article 6 paragraph (1) which is the main focus of this research, because in the previous regulation, local governments had authority in mineral and coal mining management, but in the latest law the authority of local governments was removed and changed to only the central government has the authority in mineral and coal mining management. The type of research used in this paper is normative legal research method. The approach method used, namely the statutory approach, comparative approach and conceptual approach. The legal materials used include primary, secondary and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials in this study by looking for laws and regulations related to legal issues with normative analysis techniques so that this research produces prescriptive conclusions. The results of the research obtained after analyzing the suitability of Article 6 paragraph (1) of Law Number 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining to the concept of autonomy, the concept of a unitary state and fairness in the division of affairs in accordance with Article 18A paragraph (2) of the 1945 Constitution, as well as comparing the old law with the current one, are not suitable, there is a conflict of norms and is not in accordance with the principle of regional autonomy mandated by the constitution because it has been found that there is a centralization of authority and an unfair division of affairs in the management of mineral and coal mining.

Keywords: Regional Autonomy, Authority, Mineral and Coal Mining.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN.....	i
SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
HALAMAN HASIL UJI PLAGIASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
HALAMAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vii
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	6
1.4.2 Manfaat Praktis.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Jenis Penelitian.....	7
1.5.2 Metode Pendekatan.....	7

1.5.3	Sumber dan Jenis Bahan Hukum	8
1.5.4	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	9
1.5.5	Teknik Analisis Bahan Hukum	9
1.6	Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA		11
2.1	Konsep Negara Kesatuan	11
2.2	Konsep Otonomi Daerah	14
2.3	Konsep Sentralisasi	19
2.4	Konsep Kewenangan	20
2.5	Konsep Desentralisasi	23
2.6	Pertambangan Mineral dan Batubara	26
BAB III PEMBAHASAN		29
3.1	Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah	29
3.1.1	Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara	38
3.1.2	Asas Preferensi Pada Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara	46
3.2	Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Ditinjau dari Pasal 18A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945	53
3.2.1	Kewenangan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Perspektif Otonomi Daerah	60
BAB IV PENUTUP		71
4.1	Kesimpulan	71
4.2	Saran	71
DAFTAR PUSTAKA		73